**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDANGAN *ONLINE***

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI**

**DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUKTI ARIEF WIBOWO**

**NPM. 5119500248**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDANGAN *ONLINE***

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI**

**DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**MUKTI ARIEF WIBOWO**

**NPM. 5119500248**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

| Pembimbing I,**Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.**NIDN. 8958840022 | Tegal, 21 Desember 2023Pembimbing II,**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**NIDN. 0608087702 |
| --- | --- |
| Mengetahui,Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program StudiDr. H. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.NIDN. 0615067604 |

| **HALAMAN PENGESAHAN** **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDANGAN *ONLINE*** WhatsApp Image 2024-08-20 at 14.50.54**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI** **DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK****Mukti Arief Wibowo**NPM. 5119500248Telah Diperiksa dan Disahkan olehTegal, 24 Juli 2024Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Ketua Sidang) ...........................................Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Penguji II) ...........................................Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Penguji I) ...........................................Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Pembimbing II) ..........................................MengetahuiDekan,Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.NIDN. 0615067604**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

|  Yang bertanda tangan di bawah ini: |
| --- |
| Nama | : | Mukti Arief Wibowo |
| NPM | : | 5119500248 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pemalang, 7 Mei 1999 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDANGAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** |

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

|  | Tegal, 7 Mei 2024Yang menyatakan |
| --- | --- |
|  | (Mukti Arief Wibowo) |

**Abstrak**Kasus penipuan *online* yang sedang ramai saat ini ialah penipuan dengan modus undangan *online* di media sosial. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi.Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia. (2). Untuk menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensionaldan *online* serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP Pasal 378-395 dan secara khusus diatur pada Pasal 378 KUHP, sedangkan penipuan *online* pengaturannya terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Modus undangan online pada tindak pidana penipuan terbilang baru. Menurut Bareskrim Polri, sejak akhir tahun 2022, sudah ada 29 (dua puluh sembilan) laporan terkait dengan kasus penipuan dengan modus undangan online. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian saat ini terhadap para pelaku penipuan dengan modus undangan online adalah melakukan penangkapan salah satunya yaitu menangkap pelaku pembuat aplikasi undangan *online* tersebut. Penegak hukum biasanya mengenakan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 1.000.000. 000, sedangkan untuk membuktian kesalahan pelakunya digunakan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pengakuan terhadap informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penipuan, Undangan *Online****Abstract****The case of online fraud that is currently popular is fraud using online invitation mode on social media. Law enforcement against criminal acts of fraud using online invitation mode is very important. Lack of strict and clear law enforcement is the trigger for this criminal act of fraud to continue to occur.**This research aims: (1). To describe the regulation of criminal acts of fraud in Indonesian law. (2). To analyze law enforcement against criminal acts of fraud using the online invitation mode based on the Information and Electronic Transactions Law.**The type of research is library research. Research specifications are prescriptive. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique is through conventional and online literature searches and analyzed using qualitative data analysis because the data will be presented in a narrative-descriptive manner, not in numerical or numerical form.**The results of this research show that criminal acts of fraud in Indonesian law are regulated in the Criminal Code and the Information and Electronic Transactions Law. In the Criminal Code, the crime of fraud is regulated in Chapter XXV Book II of the Criminal Code Articles 378-395 and specifically regulated in Article 378 of the Criminal Code, while online fraud is regulated in Article 28 Paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions Law. The online invitation mode for criminal fraud is relatively new. According to Bareskrim Polri, since the end of 2022, there have been 29 (twenty nine) reports related to cases of fraud using the online invitation mode. The law enforcement carried out by the Police currently against perpetrators of fraud using the online invitation mode is to make arrests, one of which is arresting the perpetrator who created the online invitation application. Law enforcers usually impose multiple articles as regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 Paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions Law with the threat of imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum of Rp. 1,000,000. 000, while to prove the perpetrator's guilt, Article 5 and Article 6 of the Information and Electronic Transactions Law are used as recognition of information, documents and electronic signatures as valid evidence in court.**Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.****Keywords:*** *Law Enforcement, Fraud, Online Invitation***PERSEMBAHAN**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:1. Orang tua atas doa, motivasi dukungan dan harapannya.
2. Keluarga serta rekan-rekan saya yang saya cintai.
3. Semua dosen tanpa terkecuali terimakasih atas ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

**MOTTO**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”**KATA PENGANTAR**Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing I) dan Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata Satu. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
6. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
7. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
8. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

|  | Tegal, Agustus 2024Penulis |
| --- | --- |

 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**DAFTAR ISI**

 Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

PERSEMBAHAN vii

MOTTO viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 7
4. Manfaat Penelitian 7
5. Tinjauan Pustaka 8
6. Metode Penelitian 11
7. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 20

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penipuan 20
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum 29
3. Gambaran Umum Kejahatan Siber 40
4. Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Penegakan Hukum 48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Di

Indonesia 58

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undangan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 76

BAB IV PENUTUP 101

1. Simpulan 101
2. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 109

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan dunia tanpa batas.[[1]](#footnote-0)

Kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya[[2]](#footnote-1). Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui.

berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan *online shop[[3]](#footnote-2)*.

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*) dengan realitas virtual (*virtual reality*). Kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *EFTS* (*Electronic Funds Transfer* *System* atau sistem transfer dana elektronik), *internet banking*, *cyber bank*, *on-line business* dan sebagainya[[4]](#footnote-3).

Perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan modern[[5]](#footnote-4). Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya[[6]](#footnote-5). Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus at-tack*) dan sebagainya[[7]](#footnote-6).

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau dalam istilah asing disebut *cyber crime* (kejahatan siber). Definisi tentang kejahatan siber lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler.

Tingkat kejahatansiber di Indonesia masuk dalam peringkat ke dua di dunia.  Kejahatan siber di Indonesia sudah dilaporkan sebanyak 6.388 kasus sejak tahun 2019 hingga 22 Mei 2020. Kejahatan tersebut paling banyak berupa penyebaran konten provokatif yakni 2.584 laporan. Sementara kejahatan kedua paling banyak diterima oleh patroli siber yakni penipuan *online* sebanyak 2.147 kasus.

Kejahatan siber naik signifikan pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, bahkan jumlah kejahatan siber meningkat hingga 14 (empat belas) kali. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukan Kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan Polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan siber yaitu 3.709 perkara. Sementara pada periode yang sama di tahun 2021, jumlah penindakan yaitu 612 di seluruh Indonesia. Hanya 26 satuan kerja yang melakukan penindakan.

Salah satu kejahatan dengan memanfaatkan media *online* yaitu penipuan. Tidak jauh berbeda dengan di dunia maya penipuan *online* marak terjadi di lingkungan masyarakat. Penipuan *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara *online* sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer)[[8]](#footnote-7).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia. Tercatat sebanyak 26 persen konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara *online*. Data yang tersedia sejak tahun 2016 hingga 2020 mencatat total 7.047 kasus penipuan *online* dilaporkan dan penipuan *online* memiliki persentase 28,7% dari total kejahatan siber.[[9]](#footnote-8) Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah korban penipuan *online* terbesar di dunia.

Kasus penipuan *online* yang sedang ramai saat ini ialah penipuan dengan modus undangan *online* di media sosial. Modus penipuan undangan pernikahan elektronik yang disebarkan melalui pesan sedang marak terjadi cukup meresahkan masyarakat. Pelaku penipuan ini melakukan penipuan dengan menyematkan dokumen aplikasi APK format file aplikasi untuk ponsel android dengan nama surat undangan digital pernikahan. Jika tidak teliti, penerimanya tidak akan mengetahui jika dokumen yang dibagikan itu merupakan undangan palsu yang digunakan untuk membobol data pribadi korban dan mengakses data perbankan. Penipuan undangan pernikahan elektronik juga dapat terjadi melalui pesan teks (SMS) atau pesan langsung di platform media sosial. Penipu ini seringkali menggunakan teknik yang sangat persuasif, seperti mengklaim bahwa undangan tersebut terbatas atau ada penawaran spesial yang hanya berlaku untuk waktu tertentu. Hal ini dapat mengecoh calon tamu yang tidak curiga dan membuat mereka terjebak dalam perangkap penipuan[[10]](#footnote-9).

Penipuan secara *online* maupun konvensional secara hukum dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam KUHP. Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan *online*, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan media *online* telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun realitasnya terdapat beberapa kendala dalam menerapkan peraturan tersebut pada konteks tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online*.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* menjadi semakin penting mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korban seringkali mengalami kerugian finansial, serta kerugian psikologis akibat pelanggaran privasi dan kehilangan kepercayaan terhadap dunia maya. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undangan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan atas uraian latar belakang adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, guna memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik akademisi dan praktisi hukum, aparat penegak hukum, masyarakat secara umum, serta pihak lain terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penggalian informasi dilakukan berdasarkan sumber data penelitian yang relevan dengan meninjau literatur tentang permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* dengan titik fokus dan pendekatan yang berbeda, antara lain:

1. Fadil Aksa (2022), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online* *(Studi Kasus Polisi Daerah Jambi).* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* di wilayah hukum Polisi Daerah Jambi dan kendala dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* di wilayah hukum Polisi Daerah Jambi. Hasil analisis menemukan bahwa berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok arisan *online* dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif). Kendala proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* di Polisi Daerah Jambi dari tahun 2018-2021 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan oleh pihak yaitu dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum[[11]](#footnote-10).
2. Zabindin (2021), *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dan faktor yang menghambat penegakan tindak pidana penipuan *online*. Hasil analisis menemukan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online* pada penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan KUHP terkait Pasal 378. Dalam mendukung dasar hukum yang ada dapat digunakan juga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut dapat bersifat khusus (*lex spesialis derogat lex generale*) atau UU ITE setidaknya dapat menjadi panduan dan landasan hukum untuk lingkungan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Faktor yang menghambat aparat dalam penegakan hukum ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan secara *online*. Sarana prasarana dalam mendukung proses pembuktian dan Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum penipuan online diperlukan pihak-pihak penegak hukum yang teliti dalam menentukan pasal yang digunakan dalam penyelesaian perkara, kemudian aparat penegak hukum perlu didukung secara sarana prasarana dan dibekali kemampuan dalam bidang IT untuk mendukung proses penyidikan[[12]](#footnote-11).
3. Indah Nurul Chumairoh (2021), *Tinjauan Pasal 28 Uu Ite Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online* (*Studi Analisis Putusan Pn Kab. Kediri Nomor 340/Pid.B/2019/Pn Kab. Kediri*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang proses penyelesaian tindak pidana penipuan undangan *online*, menganalisis beberapa kendalanya, dan mencari upaya penanggulangan dalam tindakan pidananya. Hasil analisis menemukan bahwa pada Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Harysta Riastari terbukti memenuhi unsur-unsur penipuan pada Pasal 28 Undang Undang ITE. Walaupun dalam Pasal 28 Undang Undang ITE tidak secara detail membahas mengenai tindak pidana penipuannya tetapi unsur-unsur yang ada pada pasal ini adalah sama yaitu mengenai setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan berita bohong; yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap dari unsur yang disebutkan, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi setiap dari unsur tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa undang-undang yang bisa menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan jenis arisan online ini tidak hanya KUHP melainkan bisa juga dijerat berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang ITE[[13]](#footnote-12).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid.  Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional*,* sistematisdan empiris*.*

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang berguna menentukan, menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan[[14]](#footnote-13). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif. Proses hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan (menghukum atau membebaskan), merupakan bentuk dari penelitian yang preskriptif. Penelitian ini menggunakan sifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif itu yang dianggap substansial dalam mempelajari ilmu hukum, dikarenakan tidak akan dipelajari dalam ilmu sosial lainnya yang objeknya sama yaitu hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yaitu pendekatan kasus*,* pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan dengan cara menganalisis atau mengkaji aturan hukum seperti undang-undang berdasarkan hukum positif di Indonesia atau yang berlaku saat ini, yang erat kaitannya dengan tindak kejahatan penipuan undangan *online*[[15]](#footnote-14). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan[[16]](#footnote-15).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

* 1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
	2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
	3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.[[17]](#footnote-16) Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan untuk memperoleh makna baru yang terkandung atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

1. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*[[18]](#footnote-17). Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan[[19]](#footnote-18). Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

Data sekunder di bidang hukum dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier[[20]](#footnote-19).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini[[21]](#footnote-20). Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian[[22]](#footnote-21). Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[[23]](#footnote-22). Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

* 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
	2. Kamus hukum.
	3. Situs internet yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undangan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif ada empat teknik untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu studi kepustakaan, wawancara, angket dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensionaldan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undangan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Hal ini mengandung beberapa pengertian bahwa dalam pelaksanaannya analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data, hal ini perlu dilakukan secara intensif agar data terkumpul semuanya[[24]](#footnote-23).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Analisis dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak mungkin tanpa analisis dan tafsiran untuk mengetahui apa maknanya. Analisis dilakukan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh[[25]](#footnote-24).

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Fokus masalah pada penelitian kualitatif sama kedudukannya dengan rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Fokus masalah dibuat oleh peneliti agar masalah yang akan diteliti lebih sederhana dan tidak mengambang. Dengan demikian peneliti dapat lebih terarah dan lebih fokus sehingga memudahkan untuk menjawab masalah yang diteliti melalui analisis data yang diakhiri dengan kesimpulan[[26]](#footnote-25).

1. **Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana dan tindak pidana penipuan, tinjauan umum tentang pengertian dan ruang lingkup penegakan hukum, tinjauan umum tentang gambaran umum kejahatan siber, dan tinjauan umum tentang tugas dan wewenang polri dalam penegakan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undangan *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran atau rekomendasi

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penipuan**

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia. Untuk istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau *delict* untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia di samping istilah tindak pidana juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku atau dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana[[27]](#footnote-26). Dalam kepustakaan disebut istilah-istilah lain tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delik[[28]](#footnote-27).

Berikut ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana. Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab[[29]](#footnote-28). Tentang perumusan *strafbaarfeit* itu Van Hamel sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum[[30]](#footnote-29). Selanjutnya dikemukakan pula

mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

Moeljatno mengartikan istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Pengertian pidana menurut beliau adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek sifat melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata perbuatan. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeing* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang da diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* juga termaksud *het nalaten* (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).

Pada prinsipnya setiap perumusan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebaga asas hukum yang tidak tertulis yaitu *Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe* (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Adanya keadaan batin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan.
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

Beragam istilah terjemahan *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia dalam mengintrodusir dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Di samping itu semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana dapat juga kita simpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan hukum
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum
3. Orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
5. Orangnya harus bersalah
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Perbuatan manusia
2. Bersifat melawan hukum
3. Dapat dicela

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Berdasarkan KUHP tindak pidana dibedakan antara lain “Kejahatan” dalam buku II dan “Pelanggaran” dalam buku III. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi sistem hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada secara universal.
2. Berdasarkan dari perumusan tindak pidananya, ada formil dan materil. Dimana formil dimaksudkan untuk perbuatan tertentu yang telah dilakukan, sedangkan materil melihat pada akibat yang dilarang yang telah ditimbulkan dan diminta pertanggungjawaban sampai dengan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk dari kesalahan yang diperbuat yang dibedakan menjadi tindakan yang disengaja dan tidak disengaja. Misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dengan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan masih banyak contohnya, sedangkan tindakan pidana yang tidak sengaja misalnya pada Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP akibat kelalaian dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.
4. Berdasarkan jenis perbuatannya maka dibedakan menjadi tindak pidana secara aktif atau tindakan yang berdasarkan gerakan tubuh orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai contohnya yaitu pada kasus pencurian atau pembunuhan. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu tindak pidana pasif yang terbagi lagi menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Misalnya yaitu seorang ibu yang tidak menyusui anaknya yang masih bayi sehingga berakibat anak tersebut kehilangan nyawa dan diatur berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* yang terdapat di dalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah *oplichting* yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan darinya.

Penipuan dalam arti luas adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya)[[31]](#footnote-30).

Dalam hukum Islam penipuan disebut sebagai *khodiun*, secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai khoduun sedangkan orang yang tertipu terperdaya disebut mahduun. Penipuan adalah suatu prilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidanayang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan kesalahan tidak hanya yang terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah karena kebodohannya sehingga ia tertipu.

Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa

Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai. Untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.

1. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis

Penipuan menurut yuridis yaitu tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kata penipuan dari sudut bahasa Indonesia merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian yaitu perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan sesorang dari jabatannya.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian[[32]](#footnote-31). Penipuan yang bersifat kecil dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

1. **Pengertian Dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan masyarakat hukum menjadi kenyataan[[33]](#footnote-32). yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum[[34]](#footnote-33). Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dibagi dua pengertian yaitu dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum[[35]](#footnote-34). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral. Adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya[[36]](#footnote-35).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu[[37]](#footnote-36).

1. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

1. Keadilan

Keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *as a tool of sosial engineerning*

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

1. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

1. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Ada tiga unsur dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya ini yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari langkah penegakan hukum. Dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial serta menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum. Dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana merupakan proses untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar selaras dengan cita-cita dari diciptakan suatu hukum itu sendiri, yakni terwujudnya sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi.

Ada 12 (dua belas) faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu:

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri.
2. Sistem dalam perundangan belum memadai.
3. Faktor sumber daya manusia.
4. Adanya faktor kepentingan yang melekat pada aparat:
5. Kepentingan pribadi.
6. Kepentingan golongan.
7. Kepentingan politik kenegaraan.
8. *Corspgeits* dalam institusi.
9. Tekanan yang terdapat kuat pada aparat penegak hukum.
10. Faktor budaya, agama, dan kepemimpinan.
11. Legislatif sebagai lembaga legislasi perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia
12. Kemauan politik pemerintah.
13. Adanya jaringan kerja pelaku kejahatan yang kuat (*organize crime*).
14. Pengaruh kolusi dalam jiwa aparat penegak hukum.
15. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Terhadap tujuan penegakan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni dengan tujuan mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Ketertiban mustahil akan terwujud apabila hukum sendiri diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak hanya berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, melainkan ikut berperan dalam membentuk kultur atau budaya hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Istilah kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pada proses tersebut, hukum tidak mandiri, artinya terdapat faktor lain yang mempunya hubungan erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Pada fase ini hukum tidak lebih hanya ide-ide ataupun konsep-konsep yang mencerminkan mengenai apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu.

Pada hakikatnya tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Dalam merealisasikan tujuan hukum tersebut, maka sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya dalam masyarakat.

Penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu:

1. Faktor hukum

Dalam hal praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupkan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum.

Hakikat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* saja, melainkan adanya *peace maintance*. Dengan demikian pengelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyelarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

1. Kepribadian atau mentalitas penegak hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kebejatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis Kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap. Hal ini jg didasari bahwa tugas yang diemban Kepolisian begitu luas dan banyak.

1. Taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat

Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.

1. Faktor budaya dan masyarakat

Secara konsepsional terdapat beberaoa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, contohnya cara penegakan hukum di daerah Papua akan sangat berbeda jika dibandingkan penegakan hukum di Jakarta.

1. **Gambaran Umum Kejahatan Siber**

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Darnpak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan.

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau komunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Barda Nawawi Arief menggunakan istilah tindak pidana mayantara untuk menunjukan jenis kejahatan ini. Dengar kata lain kejahatan siber merupakan tindak pidana dengan mengunakan teknologi informasi sebagai wahana sasaran. Teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah media komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, bahkan bisa menembus negara lain[[38]](#footnote-37).

Secara sederahana yang dimaksud dengan kejahatan siber adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar atau melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemerosesan data dan/atau pengiriman data. Umumnya perbuatan tersebut dilakukan dengan melalui perangkat digital dalam suatu dunia maya (*cyber*).

Definisi kejahatan siber di atas dapat diartikan sebagai berikut: kejahatan siber adalah kejahatan di dunia *cyber* atau dunia virtual dengan menggunakan teknologi tinggi. Kejahatan ini juga dapat didefinisikan sebagai kejahatan di mana teknologi informasi merupakan target dari kejahatan atau di mana teknologi informasi dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain kejahatan menggunakan teknologi informasi, teknologi informasi sebagai alat, teknologi informasi sebagai tempat penyimpanan, dan teknologi informasi sebagai target.

Dari definisi di atas, kita bisa mengetahui unsur dari kejahatan siber sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan tanpa kewenangan.
2. Menggunakan teknologi tinggi atau digital.
3. Dengan teknologi informasi sebagai sasaran atau sarana kejahatan.
4. Di dunia siber.

Pada dasarnya kejahatan siber merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau *wireles system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan siber dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kejahatan siber dalam arti sempit dan kejahatan siber dalam arti luas. Kejahatan siber dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer. Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa kejahatan siber merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

Kejahatan siber memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang atau wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Kejahatan siber muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Di sisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari kejahatan siber adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokan dalam bentuk, antara lain[[39]](#footnote-38):

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau menganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scrptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau pengahancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis kejahatan siber berdasarkan motifnya, yaitu:

1. Kejahatan siber sebagai tindak kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

1. Kejahatan siber sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.

1. Kejahatan siber yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, *cyber stalking*, dan lain-lain

1. Kejahatan siber yang menyerang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi.

1. Kejahatan siber yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

Kejahatan siber memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasian informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara.

Terdapat berbagai jenis tindak kejahatan siber. Berikut empat jenis tindak kejahatan siber:

1. Penipuan *Phising*

Seperti namanya, *phising*yang dapat diartikan pelaku “memancing” para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tidak sadar sedang terkena penipuan *phising*karena pelaku yang pintar berbicara dengan “memancing” pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban.

1. Peretasan

Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa ijin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan.

1. *Cyber Stalking*

*Cyber stalking*atau penguntitan siber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban.

1. *Cyber Bullying*

*Cyber bullying*merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara *online*melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial.

Kejahatan siber meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman dan pemerasan, ekploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. Kejahatan siber juga dapat berbentuk pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh Sue Titus Reid, bahwa kejahatan siber meliputi *data diddling*, *the trojan horse*, *the salami technique*, *superzapping*, *and date leakgage*.

Berdasarkan uraian *Handbook on Computer Crime*, kejahatan siber dikategorikan menjadi tiga. Kategori pertama, kejahatan siber adalah kejahatan ekonomi yang terkait dengan komputer, meliputi penipuan dengan manipulasi komputer, pembajakan perangkat lunak komputer, spionase komputer, sabotase, pencurian jasa, akses tidak sah ke dalam sistem atau jaringan komputer, komputer sebagai alat untuk menyerang bisnis tradisional. Kategori ke dua, adalah pelanggaran terhadap keleluasaan pribadi, yaitu penggunaan data yang tidak benar, pengumpulan data secara tidak sah, penyalahgunaan data, pelanggaran rahasia perusahaan. Kategori ke tiga, misalnya melakukan penyerangan terhadap dan kepentingan politik, dan penyerangan terhadap kebebasan pribadi orang per orang.

Dalam kasus kejahatan siber, baik korban maupun pelaku tidak berhadapan langsung dalam 1(satu) tempat kejadian perkara. Dalam beberapa kasus, baik korban maupun pelaku dapat berada pada negara yang berbeda. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational* *crime*), dan tidak berbatas (*borderless*), tanpa kekerasan (*non violence*), tidak ada kontak fisik (*no phisically contact*) dan tanpa nama (*anonimity*).

1. **Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Penegakan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti sebaga badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
3. Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu
4. Sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal Kepolisian.

Polri sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana fungsi Polri adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Selain itu, Polri mempunyai peran yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri adalah salah satu komponen administrasi negara dan atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan dituntut untuk dapat menafsirkan hukum yang dogmatis ke dalam realita kehidupan masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat menjelma menjadi suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Secara universal peran Polri dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian Polri sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*)[[40]](#footnote-39). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk yang ada dalam lingkup negara. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tribrata serta jiwa yang besar. Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan rakyatnya. Dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan yang dapat merugikan masyarakat.

Pada prinsipnya tugas-tugas Polri secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib. Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran dari tugas-tugas pokok Polri tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

1. Menerima laporan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketrtiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi.

Khusus di bidang proses pidana, Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
3. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
4. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
5. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
11. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
12. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
13. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
14. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
15. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
16. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
17. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
18. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
19. Menghormati hak asasi manusia.

Penanganan tindak pidana oleh Kepolisian terdiri dari dua yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam *the criminal justice system*, telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana menurut KUHAP[[41]](#footnote-40). Kewenangan Kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana merupakan kewenangan yang bersifat kordinatif antar unsur penegakan hukum Iainnya.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polisi atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan secara bersamaan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum atau KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu.[[42]](#footnote-41) Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

1. Dendi Pajriansyah, *et. al*., Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual Beli Online, 1 (4), Mei, 2023. https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/download/28/19/. [↑](#footnote-ref-0)
2. Fitri Yani dan Erni Darmayanti, Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Justitia*, 3 (1), Januari, 2021. http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/1355. [↑](#footnote-ref-1)
3. Astrid Kusuma Rahardaya dan Irwansyah, Studi Literatur Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3 (2), Juli, 2021. https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/248. [↑](#footnote-ref-2)
4. Mus Muliadin, Fajar Dian Aryani, Evy Indriasari, Erwin Aditya Pratama, Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2), November, 2020. https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/102/27. [↑](#footnote-ref-3)
5. Melati Rosanensi dan Lanang Sakti, Hukum Teknologi Informasi: Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media di Internet, *Jurnal Fundamental Justice*, 2 (2), September, 2021. https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1521. [↑](#footnote-ref-4)
6. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-5)
7. Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 47-54. [↑](#footnote-ref-6)
8. Noor Rahmad, Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), Juli-Desember, 2019. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/2419/2357. [↑](#footnote-ref-7)
9. Zabindin, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, 18 (2), 2021. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/download/2722/1683. [↑](#footnote-ref-8)
10. Admin, Waspada! Modus Undangan Pernikahan Elektronik. https://csirt.kalbarprov.go.id/posts/penipuan-undangan-pernikahan-elektronik [↑](#footnote-ref-9)
11. Fadil Aksa, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi), *Skripsi*, 2022. http://repository.unbari.ac.id/1759/1/skripsi%20fadil%201.pdf#. [↑](#footnote-ref-10)
12. Zabidin, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, 18 (2), 2021. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/2722#. [↑](#footnote-ref-11)
13. Indah Nurul Chumairoh, Tinjauan Pasal 28 UU ITE Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online (Studi Analisis Putusan Pn Kab. Kediri Nomor 340/Pid.B/2019/Pn Kab. Kediri), Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
14. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-13)
15. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-14)
16. Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-15)
17. Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022, hlm. 303. [↑](#footnote-ref-16)
18. Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-17)
19. Rokilah, The Role of the Regulations in Indonesia State System, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 2020. https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2216. [↑](#footnote-ref-18)
20. Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (I), Juni, 2020. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859. [↑](#footnote-ref-19)
21. Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-20)
22. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-21)
23. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-22)
24. Nurdewi, Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1 (2), Oktober, 2022. https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/235/238. [↑](#footnote-ref-23)
25. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-24)
26. Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-25)
27. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-26)
28. Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-27)
29. M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-28)
30. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-29)
31. Ellis Purnama dan Ardiyan Saptawan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN PLG), *Jurnal Hukum Doctrinal*, 7 (2), September, 2022. https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/5985/3437. [↑](#footnote-ref-30)
32. Hanief Widiantoro dan Mas Agus Priyambodo, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim), *Jurnal Ilmiah Publika*, 11 (1), Januari-Juni, 2023. https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/8204/3186. [↑](#footnote-ref-31)
33. Hamidah Abdurrachman, *et. al*., Environmental Crime and Law Enforcement in Indonesia: Some Reflections on Counterproductive Approaches. *Environmental Policy and Law,* 51 (6), 2021. <http://repository.upstegal.ac.id/5995/1/EPL210024-Hamidah%20et%20al.pdf>. [↑](#footnote-ref-32)
34. Adam H. Muhammad, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal JISH*, 3, Juli-Desember, 2017. https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/download/16/10. [↑](#footnote-ref-33)
35. M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Al-Himayah*, 4 (1), Maret, 2020. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/1625/999. [↑](#footnote-ref-34)
36. Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 6 (2), Desember, 2019. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf. [↑](#footnote-ref-35)
37. Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (*Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*), Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-36)
38. Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-37)
39. Maskun, *Kejahatan Siber* (*Cyber Crime*) *Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm. 51-54. [↑](#footnote-ref-38)
40. Nanda Ivan Natsir, Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jatiswara: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 34 (1), 2019. https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/197. [↑](#footnote-ref-39)
41. Mursalim, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Al Hikam*, 1 (3), 2017. https://media.neliti.com/media/publications/287974-kewenangan-penyidik-polri-dalam-penangan-e1cd242c.pdf. [↑](#footnote-ref-40)
42. Vebi Shinta Monica dan Ali Rahman, Peranan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB*), Sumbang 12 Law Journal*, 1 (2), Januari, 2023. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/4081/2956. [↑](#footnote-ref-41)